

**PENERAPAN PEMBERLAKUAN KEANGGOTAAN BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
SEBAGAI SYARAT WAJIB JUAL BELI HAK ATAS TANAH
DI KABUPATEN BEKASI**

SKRIPSI

Oleh:

FIRA PEBRI YENTI

201910115281



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

**PENERAPAN PEMBERLAKUAN KEANGGOTAAN BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
SEBAGAI SYARAT WAJIB JUAL BELI HAK ATAS TANAH
DI KABUPATEN BEKASI**

SKRIPSI

Oleh:

FIRA PEBRI YENTI

201910115281



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Pemberlakuan Keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Sebagai Syarat Wajib Jual Beli Hak Atas Tanah Di Kabupaten Bekasi.

Nama Mahasiswa : Fira Pebri Yenti

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115281

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Esther Masri, S.H., M.Kn.

NIDN. 0312017904

Heru Siswanto, S.H., M.Kn.

NIDN. 0302058801

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Pemberlakuan Keanggotaan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan Sebagai Syarat Wajib Jual Beli
Hak Atas Tanah Di Kabupaten Bekasi.

Nama Mahasiswa : Fira Pebri Yenti
NPM : 201910115281
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juni 2023

Bekasi, 22 Juni 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M
NIDN. 0312117102 


Penguji I : Esther Masri, S.H., M.Kn.
NIDN. 0312017904 

Penguji II : Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.
NIDN. 0306018804 

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Diana Fitriana S.H., M.H.
NIDN. 0424039003


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fira Pebri Yenti
NPM : 201910115281
TTL : Bekasi, 30 Oktober 2001
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “PENERAPAN PEMBERLAKUAN KEANGGOTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SEBAGAI SYARAT WAJIB JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN BEKASI.” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang dituiis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, **22 Juni** 2023

Yang membuat pernyataan,


Fira Pebri Yenti

NPM. 201910115281

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fira Pebri Yenti
NPM : 201910115281
TTL : Bekasi, 30 Oktober 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PENERAPAN PEMBERLAKUAN KEANGGOTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SEBAGAI SYARAT WAJIB JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN BEKASI.”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, **22 Juni** 2023

Yang membuat pernyataan,



Fira Pebri Yenti

NPM. 201910115281



ABSTRAK

Fira Pebri Yenti. 201910115281. *Penerapan Pemberlakuan Keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Sebagai Syarat Wajib Jual Beli Hak Atas Tanah di Kabupaten Bekasi.*

Setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 pertanggal 1 Maret 2022 dan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor : HR.02/153-400/11/2022. Dalam proses peralihan hak atas tanah, dalam prakteknya di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi penetapan ini berlaku sejak pertanggal 1 Maret 2022 pihak pembeli diharuskan memiliki kartu badan penyelenggara jaminan kesehatan sosial yang aktif dan tanpa memiliki tunggakan, dengan penetapan syarat baru ini menjadi sebuah syarat yang sah dan telah menjadi sebuah syarat tambahan agar dapat terjadinya proses pengalihan hak/proses balik nama yang sesuai dibutuhkan oleh Pemohon. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Implementasi penggunaan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai syarat peralihan hak atas tanah di Kabupaten Bekasi, untuk mengkaji dan menganalisis penggunaan terhadap peralihan hak atas tanah yang tidak menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Metode pendekatan penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : *Pertama*, Analisis yuridis terhadap penggunaan kartu badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan sebagai syarat peralihan hak atas tanah di Kota Bekasi berlandaskan teori Kemanfaatan hukum. *Kedua*, analisis yuridis terhadap peralihan hak atas tanah yang tidak menggunakan kartu BPJS berlandaskan teori keadilan hukum. Keterkaitannya adalah tindakan apa yang akan diambil oleh seorang pemegang peran sebagai respon terhadap peraturan hukum, dikendalikan oleh peraturan hukum dikatakan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan sebuah keadilan.

Kata kunci: Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Syarat, Peralihan Hak Atas Tanah

ABSTRACT

Fira Pebri Yenti. 201910115281. Implementation of Enforcement of Membership of the Health Social Security Administering Body as a Mandatory Requirement for the Sale and Purchase of Land Rights in Bekasi Regency.

After the issuance of the Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 1 of 2022 dated March 1, 2022 and in accordance with the Circular Letter of the Director General of Determination of Land Rights and Registration Number: HR.02/153-400/11/2022. In the process of transferring land rights, in practice at the Office of the National Land Rights in Bekasi Regency., this stipulation is effective as of March 1, 2022, the buyer is required to have an active social health insurance administering agency card and without arrears, with the stipulation of this new condition being a mandatory requirement. is valid and has become an additional requirement so that the transfer of rights/transfer of names process can occur as required by the Applicant. This study aims to examine and analyze the juridical implications of using the Health Social Security Administering Body card as a condition for the transfer of Land Rights in Bekasi Regency, to examine and analyze the juridical implications of the transfer of land rights that do not use the Health Social Security Administering Body. The research approach method used in this research is the normative juridical law research method. Collecting research data using interview techniques and study of documents or library materials. The results of the study show that: First, the juridical analysis of the use of health social security administering agency cards as a condition for transferring land rights in Bekasi City is based on the theory of legal advantage. Second, the juridical implications for the transfer of land rights that do not use the BPJS card are based on the theory of legal justice. The linkage is what action will be taken by a role holder in response to legal regulations, controlled by legal regulations is said to be part of an effort to realize justice.

Keywords: *Health Social Security Administering Body Card, Terms, Transfer of Land Right.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul “PENERAPAN PEMBERLAKUAN KEANGGOTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SEBAGAI SYARAT WAJIB JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN BEKASI”. Penulis menyadari dalam proses penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini, banyak sekali pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widjowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Esther Masri, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Bapak Heru Siswanto, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan dan dukungan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Untuk kedua orang tua saya, Bapak Rudi Hartono dan Ibu Yetti Murni yang telah memberikan kasih sayang, doa, semangat, nasihat, bimbingan, pengorbanan dan kesabaran yang penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk Adik saya tercinta Farel Hartono, terima kasih atas doa dan dukungannya baik secara moral.

8. Untuk teman baik saya, Aisha Putri Ramadhanie yang setia menemani saya mengerjakan penulisan skripsi ini dan mendengarkan keluh kesah saya.
9. Untuk teman baik saya, Moehammad Tegar yang selalu menghibur, membantu, dan mendukung saya selama penulisan skripsi ini.
10. Untuk teman-teman kelas A4 angkatan 2019. Terima kasih atas waktu yang kita miliki bersama, terima kasih atas suka dan duka selama perkuliahan, terima kasih atas pengalaman canda dan tawa, saya berharap segala urusan yang akan kita hadapi nantinya diberi kemudahan.
11. Untuk teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya .



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	10
1.4 Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	11
1.4.1 Kerangka Teoretis.....	11
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	15
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	17
1.5 Penelitian Terdahulu.....	18
1.6 Metode Penelitian	20

1.6.1	Jenis Penelitian.....	20
1.6.2	Metode Pendekatan	21
1.6.3	Sumber Bahan Hukum	21
1.6.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	22
1.6.5	Metode Analisis Bahan Hukum	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		23
2.1	Tinjauan Umum Tentang BPJS	23
2.1.1	Definisi BPJS Kesehatan	23
2.1.2	Pengelolaan BPJS Kesehatan.....	23
2.2	Tinjauan Umum Tentang Pertanahan.....	26
2.2.1	Definisi Dan Dasar Hukum Mengenai Pertanahan	26
2.2.2	Peralihan Hak Atas Tanah.....	28
BAB III OBJEK PENELITIAN.....		35
3.1	Sejarah Dan Pengaturan BPJS.....	35
3.2	Keanggotaan Dalam BPJS.....	40
3.3	Permasalahan (Kasus).....	41
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN		49
4.1	Penerapan Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai Syarat Peralihan Hak Atas Tanah	49
4.2	Akibat Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah yang Tidak Menggunakan Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan..	72
BAB V PENUTUP		82
5.1	Simpulan.....	82
5.2	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		.
RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UU	Undang-Undang
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
RSU	Rumah Sakit Umum
PPAT	Pejabat Pembuat Akta Tanah



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Don't judge me by success, but judge me by how many times I fall and get back up.” –Nelson Mandela

Penelitian Skripsi ini Penulis persembahkan untuk kedua orang tua Penulis yaitu Ayahanda Rudi Hartono dan Ibunda Yetti Murni yang telah merawat Penulis sampai saat ini, memberikan dukungan moral dan finansial, memberikan doa agar menjadi anak yang berguna dan sukses bagi nusa dan bangsa. Penulis persembahkan Penelitian Skripsi ini untuk Almamater kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang senantiasa Penulis banggakan